

PWII

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kakanwil Ditjen PAS NTB Kunjungi Kejaksaan Tinggi

Syafruddin Adi - NTB.PWII.OR.ID

Jan 21, 2025 - 19:05



Mataram NTB - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Anak Agung Gde Krisna melakukan kunjungan silaturahmi

ke Kantor Kejaksaan Tinggi NTB, Selasa (21/01).

Kunjungan Kakanwil di sambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Enen Saribanon, S.H., M.H., beserta jajaran di ruang kerjanya. Tampak mendampingi Kabag Administrasi Muhtaruddin, Kabid Pelayanan dan Pembinaan Akhmad Zaenal Fikri, Kabid Pembimbingan Masyarakat I Nyoman Mudana, Kabid Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Amam Saifulhaq bersama seluruh Kepala UPT se-pulau Lombok dalam audiensi dan silaturahmi tersebut.

Kakanwil menyampaikan tujuan silaturahmi sebagai upaya memperkuat sinergi antar-aparat penegak hukum di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memberikan informasi terkait restrukturisasi organisasi di Kanwil Ditjen Masyarakat Kementerian Imigrasi dan Masyarakat, yang kini beroperasi dengan struktur baru setelah pemisahan fungsi dengan Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM.

“Kunjungan ini merupakan langkah awal dalam mempererat kerja sama antar-lembaga penegak hukum, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Imigrasi dan Masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Agung.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menyambut baik kunjungan ini dan menyampaikan harapannya agar koordinasi dan sinergi antar-lembaga semakin erat dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan pelayanan yang lebih baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Rutan Praya, Syaripuddin Hazri yang turut mendampingi Kakanwil dalam kegiatan tersebut menyatakan kesiapannya menindaklanjuti sinergitas ini, diantaranya dengan mempersiapkan langkah-langkah kerjasama lanjutan.

Dengan kunjungan ini, diharapkan hubungan baik antar-lembaga dapat terus terjaga, sekaligus mendukung tercapainya tujuan bersama dalam penegakan hukum yang profesional dan transparan di wilayah Nusa Tenggara Barat. (Adb)